

Determinan Kesenjangan Pendapatan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Annisa Brilliana Alviro¹, Anik Sri Widawati^{2*}, dan Eny Nurnilawati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

*e-mail : : anik@amikom.ac.id

ABSTRAK

Artikel Info

Received :

20 October 2025

Revised :

9 November 2025

Accepted :

20 November 2025

Kata Kunci :

Kesenjangan Distribusi
Pendapatan, Upah
Minimum, IPM, Jumlah
Penduduk Miskin, Jumlah
Keluarga Penerima Manfaat

Keywords :

Income Distribution
Inequality, Minimum Wage,
HDI, Poor Population,
Number of Beneficiary
Families

Kesenjangan pendapatan masih menjadi isu penting di Indonesia, sejalan dengan tujuan ke-10 Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan perlunya mengurangi kesenjangan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat memiliki kesenjangan pendapatan tertinggi pada periode 2021-2023, meskipun dikenal sebagai daerah dengan pencapaian pembangunan manusia yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah penduduk miskin, dan jumlah keluarga penerima manfaat terhadap kesenjangan pendapatan, dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Sementara itu, upah minimum dan jumlah keluarga penerima manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembangunan belum sepenuhnya disertai dengan pemerataan pendapatan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kesenjangan pendapatan secara berkelanjutan.

Determinants of Income Inequality in the Special Region of Yogyakarta

ABSTRACT

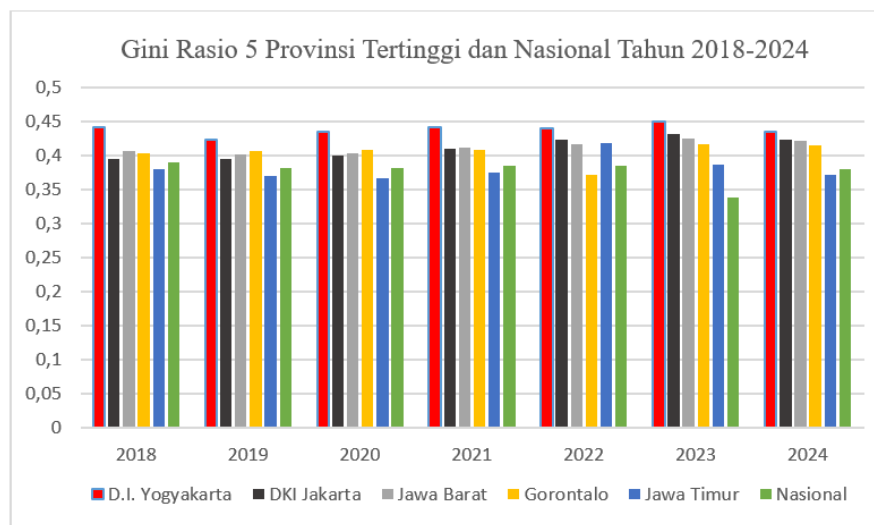
Income inequality remains a critical issue in Indonesia, aligning with Sustainable Development Goal 10, which emphasizes reducing inequality. The Special Region of Yogyakarta recorded the highest income disparity the period from 2021 to 2023, despite being know as a region with relatively high human development achievement. This study analyzes the effects of minimum wage, human development index (HDI), the number of poor people, and beneficiary families on income inequality using panel data regression. Results show that while minimum wage and beneficiary families have no significant effect. The findings suggest that development improvements have not yet ensured equitable income

distribution, highlighting the need for targeted policies to sustainably reduce income inequality.

PENDAHULUAN

Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan dan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi. Ketika distribusi pendapatan tidak merata, meskipun rata-rata pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tinggi, kekayaan dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu sementara banyak warga tetap dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Hal ini dapat memunculkan masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, eksklusi sosial, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai pusat kebudayaan dan destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Provinsi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dari waktu ke waktu. Meski demikian, DIY menghadapi permasalahan serius terkait kesenjangan pendapatan. Berdasarkan data, DIY menempati posisi tertinggi sebagai provinsi dengan tingkat kesenjangan pendapatan terbesar di Indonesia, mengungguli DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo. Kesenjangan ini disebabkan perkembangan sektor pendidikan dan pariwisata yang belum diiringi dengan pemerataan akses terhadap peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat (Khoirudin & Mustain, 2020).



Sumber : BPS, 2025

Gambar 1. Gini Rasio 5 Provinsi Tertinggi dan Nasional

Selama periode 2018 hingga 2024, Provinsi DIY mencatat tingkat gini rasio tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan data BPS (2024), tingkat kesenjangan pendapatan di Provinsi DIY secara konsisten berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2023, gini rasio DIY tercatat sebesar 0,43, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada pada level 0,37. Tingginya tingkat kesenjangan ini mengindikasikan adanya disparitas pendapatan yang signifikan antar kelompok masyarakat, yang dapat memperlebar jurang sosial dan ekonomi. Kesenjangan yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti meningkatnya kemiskinan, keterbatasan akses terhadap

layanan dasar, dan melemahnya kohesi sosial, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Upah minimum memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan upah minimum yang layak tidak hanya membantu pekerja berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan daya beli dan kualitas hidup mereka (Rahman & Putri, 2021; Hanum & Sarlia, 2019). Selain itu, kebijakan ini mendorong terciptanya peluang kerja baru dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Sutiono & Syafitri, 2018). Firdaus & Hasmarini (2023) juga menemukan bahwa kenaikan upah minimum secara signifikan dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Data BPS (2024) menunjukkan bahwa upah minimum di Provinsi DIY mengalami kenaikan setiap tahun sejak 2019. Pada tahun tersebut, upah minimum ditetapkan sebesar Rp1.570.923 dan mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 8,51% pada 2020 menjadi Rp1.704.608; 3,54% pada 2021 menjadi Rp1.765.000; 4,30% pada 2022 menjadi Rp1.840.915; 7,65% pada 2023 menjadi Rp1.981.782; dan 7,27% pada 2024 menjadi Rp2.125.897. Meskipun tren kenaikan tersebut konsisten setiap tahun, besaran upah minimum di Provinsi DIY masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2024, rata-rata upah minimum nasional tercatat mencapai Rp3.267.618 per bulan. Dengan demikian, selama periode 2019–2024, kesenjangan antara upah minimum di DIY dan rata-rata nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memegang peran penting dalam memengaruhi kesenjangan distribusi pendapatan. IPM digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah berdasarkan tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (Ismail et al., 2021). Farhan dan Sugianto (2022) menyatakan bahwa IPM yang tinggi dapat menurunkan kesenjangan karena meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Sebaliknya, Marti'ah (2025) berpendapat bahwa IPM yang tinggi justru dapat memperbesar kesenjangan karena hanya individu berkompentensi yang mampu memperoleh pendapatan lebih tinggi.

Berdasarkan data BPS (2024), IPM di Provinsi DIY secara umum menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2019. Pada tahun tersebut, IPM tercatat sebesar 79,99, kemudian mengalami sedikit penurunan sebesar 0,025% pada tahun 2020, yang diduga merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Selanjutnya, IPM kembali meningkat secara berturut-turut, yaitu sebesar 0,31% pada 2021, 0,52% pada 2022, 0,56% pada 2023, dan 0,57% pada 2024. Selama periode 2019 hingga 2024, IPM Provinsi DIY secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, mencerminkan capaian pembangunan manusia yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebagian besar provinsi lain di Indonesia.

Penyebab lain kesenjangan distribusi pendapatan adalah keberadaan penduduk miskin, yaitu individu atau kelompok yang kekurangan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penduduk miskin sering menghadapi berbagai hambatan seperti akses terbatas pada pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan layak, yang memperburuk ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Menurut Kunenengan et al. (2023), tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan saling terkait erat dan saling memperburuk satu sama lain.

Berdasarkan data BPS (2024), jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 11,70%, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi 12,28% dan kembali naik pada 2021 menjadi 12,80%. Namun, tren tersebut berbalik arah mulai tahun 2022, ketika angka kemiskinan menurun menjadi 11,41%, kemudian turun tajam pada

2023 menjadi 2,65%, dan kembali menurun pada 2024 menjadi 1,90%. Meskipun menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Provinsi DIY selama periode tersebut secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, menunjukkan bahwa isu kemiskinan masih menjadi tantangan serius di wilayah ini.

Jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesenjangan distribusi pendapatan. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan yang memenuhi syarat tertentu dan memiliki kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial (Siregar, 2021; Kemensos RI, 2025; Muin & Rosdiana, 2020). Peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat sering kali mencerminkan tingginya proporsi penduduk yang hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan dan ketergantungan terhadap bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang signifikan dalam masyarakat, di mana sebagian besar penduduk masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Berdasarkan data BPS (2024), jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi DIY mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 302.591 keluarga penerima manfaat. Jumlah ini meningkat sebesar 17,36% menjadi 355.101 keluarga pada tahun 2020, kemudian menurun sebesar 5,13% menjadi 337.087 keluarga pada 2021. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan tajam sebesar 574,69%, sehingga jumlah keluarga penerima mencapai 2.281.728. Namun, pada tahun berikutnya jumlah penerima menurun 14,50% menjadi 1.951.883 keluarga pada 2023, dan kembali menurun 32,82% menjadi 1.311.213 keluarga pada 2024. Selama periode tersebut, jumlah keluarga penerima manfaat di Provinsi DIY secara konsisten tetap lebih rendah dibandingkan tingkat nasional.

Fluktuasi jumlah keluarga penerima manfaat PKH dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, seperti kenaikan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau peralihan dari pekerjaan informal ke sektor formal. Selain itu, akurasi dan pembaruan data penduduk secara rutin juga memengaruhi dinamika jumlah penerima manfaat. Kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan syarat kelayakan serta efektivitas koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam verifikasi data turut berperan penting dalam menentukan jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan distribusi pendapatan di Provinsi DIY, dengan fokus pada Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk Miskin, dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat. Hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk membantu pemerintah mengurangi ketimpangan serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan ke-10.

METODE

Penelitian ini adalah dilakukan di Provinsi DIY, dianalisis menggunakan data panel kombinasi time series (2018–2024) dan cross section (5 Kabupaten/Kota), dengan total 35 data observasi. Data diperoleh dari BPS dan sumber lain yang relevan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM Perempuan, sedangkan variabel independennya meliputi Upah Minimum (UM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk Miskin (JPM), dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (JKPM). Definisi Operasional seluruh variabel penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Penjelasan	Satuan	Sumber
Kesenjangan Distribusi Pendapatan	Sebuah kondisi dimana pendapatan antara individu atau kelompok dalam suatu populasi tidak tersebar dengan merata	%	BPS
Upah Minimum	Jumlah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, seperti per jam, per hari, atau per bulan, sesuai ketentuan pemerintah atau otoritas yang berwenang.	Ribu Rupiah	BPS
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian kualitas hidup manusia, mencakup tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (aspek ekonomi).	%	BPS
Jumlah Penduduk Miskin	Kondisi sosial ekonomi di mana sebagian penduduk memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.	%	BPS
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Kelompok keluarga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, berdasarkan kriteria seperti pendapatan di bawah garis kemiskinan, minimnya aset, anggota keluarga yang rentan, keterbatasan akses layanan dasar, serta keikutsertaan dalam program seperti PKH atau BPNT.	Ribu	BPS

Penelitian ini menggunakan software E-Views 10 untuk mengolah data panel secara efisien. Pemilihan model regresi dilakukan dengan uji Chow, Lagrange Multiplier, dan Hausman untuk menentukan model Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect terbaik. Analisis juga meliputi uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2), serta uji asumsi klasik seperti normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas menggunakan metode OLS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Prob(Jarque Bera)	α	Kesimpulan
0,205872	0,05	Normal

Sumber : *Output Eviews 10, 2025*

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan residual model regresi mengikuti distribusi normal, yang penting untuk validitas uji signifikansi. Berdasarkan uji Jarque-Bera, p-value sebesar $0,205872 > 0,05$, sehingga residual dianggap berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Prob	α	Kesimpulan
0,5640	0,05	Tidak Ada Autokorelasi

Sumber : *Output Eviews 10, 2025*

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengecek hubungan antar residual dalam model regresi dari waktu ke waktu. Berdasarkan uji Breusch–Godfrey, nilai probabilitas sebesar 0,5640 ($> 0,05$) menunjukkan model regresi bebas dari gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Prob Obs*R-Squared	α	Kesimpulan
0,7269	0,05	Tidak ada Heteroskedastisitas

Sumber : *Output Eviews 10, 2025*

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glesjer dilakukan untuk memeriksa apakah varians residual model regresi konstan. Hasil menunjukkan semua nilai p-value variabel bebas lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model.

Uji Multikolinieraitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Kesimpulan
UM	1,616616	Tidak Ada Multikolinearitas
IPM	8,973253	
JPM	8,422463	
JKPM	1,329929	

Sumber: *Output Eviews 10, 2025*

Uji Multikolinearitas untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi antar variabel independen. Hasil memperlihatkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 , sehingga model bebas dari multikolinearitas.

2. Regresi Linear Data Panel

Pengujian dilakukan untuk memilih model regresi terbaik dalam menggambarkan hubungan antar variabel. Common Effect Model dipilih berdasarkan hasil uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil uji penelitian selengkapnya dijabarkan berikut ini:

Tabel 6. Hasil Regresi Common Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,500104	0,184638	-2,708568	0,0111
UM	2,04E-09	2,03E-08	0,100508	0,9206
IPM	0,010333	0,001964	5,262046	0,0000
JPM	0,006134	0,002719	2,256244	0,0315

JKPM	4,81E-06	2,39E-05	0,201079	0,8420
R-square	Adjs.R-square	F-statistik	Prob.(F-stat)	DW-stat
0,765583	0,734327	24,49421	0,000000	1,629094

Sumber : *Output Eviews 10*, 2025

Persamaan regresi linear berganda dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

$$KDP = -0,50010 + 2,038664(UM) + 0,010332(IPM) + 0,006133(JPM) + 4,813940(JKPM) + e$$

Model persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jika variabel lainnya tetap, kesenjangan distribusi pendapatan turun sebesar 0,500104.
- Kenaikan Upah Minimum menyebabkan Kesenjangan Distribusi Pendapatan naik sebesar 2,038664.
- Kenaikan IPM menyebabkan Kesenjangan Distribusi Pendapatan naik sebesar 0,010332.
- Kenaikan jumlah penduduk miskin meningkatkan kesenjangan distribusi pendapatan sebesar 0,006133
- Bertambahnya keluarga penerima manfaat menaikkan kesenjangan distribusi pendapatan sebesar 4,813940

3. Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan hasil sebagai berikut:

- Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan (signifikansi = 0,9206 > 0,05).
- Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan (signifikansi = 0,0000 < 0,05).
- Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan (signifikansi = 0,0315 < 0,05).
- Jumlah Keluarga Penerima Manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan (signifikansi = 0,8420 > 0,05).

Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji F memperlihatkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM perempuan, dengan nilai F sebesar 24.49421 dan p-value 0,000000 (<0,05).

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0.765583 menunjukkan bahwa 76% variasi Kesenjangan Distribusi Pendapatan dijelaskan oleh variabel dalam model, sementara 24% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Pembahasan

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Upah minimum di Provinsi DIY tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan. Hal ini karena mayoritas pekerja (56,33%) berada di sektor informal

yang tidak terikat aturan upah minimum dan upah minimum yang berlaku juga relatif rendah. Kenaikan upah minimum hanya berdampak pada sebagian kecil pekerja formal, sedangkan pekerja di sektor informal seperti pertanian, pedagang kecil, dan usaha rumah tangga tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Pertumbuhan ekonomi yang dirasakan sektor formal tidak merata ke sektor informal, sehingga kesenjangan pendapatan tetap tinggi. Upah minimum Provinsi DIY sebesar Rp 2.125.897 tergolong rendah dibandingkan daerah lain, sementara ekonomi Provinsi DIY yang bergantung pada pariwisata dan pendidikan lebih menguntungkan investor besar dibanding pekerja lokal dan UMKM.

Penelitian ini sejalan dengan teori pasar tenaga kerja tersegmen yang dikemukakan oleh Piore dan Doeringer (1971), yang menyatakan bahwa pekerja di sektor informal umumnya tidak mendapatkan perlindungan upah yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan pendapatan terus berlanjut meskipun telah diterapkan kebijakan upah minimum. Studi lain, seperti yang dilakukan oleh Faranisa et al. (2025) dan Maghriza & Hasmarini (2024), juga menguatkan temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa upah minimum memiliki dampak yang tidak signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut hanya berdampak pada pekerja di sektor formal, sedangkan pekerja informal yang pendapatannya fluktuatif dan tidak terikat kontrak kerja tidak merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut, sehingga ketimpangan tetap bertahan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di DIY menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan. Artinya, peningkatan IPM justru memperlebar kesenjangan pendapatan. Meskipun IPM di DIY tinggi (80,02 pada 2021), ketimpangan distribusi pendapatan juga tinggi (gini rasio 0,435). Hal ini terjadi karena manfaat peningkatan IPM lebih banyak dirasakan oleh kelompok menengah ke atas yang memiliki akses lebih baik ke pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, masyarakat miskin masih tertinggal dalam hal akses dan pemanfaatan peluang ekonomi. Wilayah seperti Gunung Kidul dan Kulon Progo mencatat IPM dan pendapatan yang lebih rendah dibanding Kota Yogyakarta, mencerminkan ketimpangan pembangunan antardaerah.

Sesuai dengan teori Human Capital yang dikemukakan oleh Becker (1993) bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun, apabila akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan tidak merata di berbagai wilayah, maka hasilnya justru dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Penelitian Frahita & Nurhayati (2025) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa IPM memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam penyediaan infrastruktur dan peluang kerja antarwilayah, yang menyebabkan kelompok masyarakat tertentu sulit mengakses sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Penduduk miskin di DIY berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan. Artinya, semakin tinggi jumlah penduduk miskin, semakin besar ketimpangan pendapatan yang terjadi. Tingginya angka kemiskinan, terutama di daerah seperti Gunung Kidul dan Kulon Progo, memperlebar jurang pendapatan antara wilayah dan kelompok masyarakat. Meskipun DIY memiliki IPM tinggi, distribusi pendapatan tetap

timpang karena pertumbuhan ekonomi tidak merata. Data BPS (2023) menunjukkan 441.000 jiwa atau 11,04% penduduk DIY hidup dalam kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Gini rasio DIY tahun 2022 sebesar 0,452, tertinggi di Indonesia, menandakan ketimpangan yang serius.

Menurut teori Nurkse (1953) bahwa kemiskinan merupakan siklus yang saling terkait sebagai penyebab sekaligus akibat dari kesenjangan sosial dan ekonomi. Akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan membuat kelompok miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut, sehingga kesenjangan semakin melebar. Temuan ini didukung oleh penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Fachruurrozi et al. (2023) dan Aswin & Utama (2019), yang menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin secara signifikan memperbesar kesenjangan dalam distribusi pendapatan, menegaskan adanya hubungan yang erat antara kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Pengaruh Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi DIY menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan. Ini menandakan bahwa bantuan sosial belum efektif dalam mengurangi ketimpangan. Fenomena ini disebabkan oleh penyaluran bantuan yang tidak merata, bersifat konsumtif, dan tidak berkelanjutan. Banyak Keluarga Penerima Manfaat masih bergantung pada bantuan tanpa peningkatan produktivitas yang berarti. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.

Data tahun 2023 menunjukkan lebih dari 300 ribu keluarga menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, terutama di daerah rawan seperti Gunung Kidul dan Kulon Progo. Namun, besaran bantuan yang terbatas (Rp 200.000–750.000 per tahap) dan sifatnya yang konsumtif membuatnya kurang berdampak jangka panjang. Selain itu, ditemukan kasus penerima bantuan yang enggan keluar dari daftar meski sudah mampu secara ekonomi. Kebocoran distribusi dan salah sasaran juga menjadi kendala utama. Menurut teori Capability Approach dari Amartya Sen, pembangunan seharusnya meningkatkan kemampuan hidup individu, bukan sekadar memberikan bantuan. Banyak program gagal karena tidak mempertimbangkan kapasitas penerima dan lemahnya tata kelola distribusi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan. Sementara itu, upah minimum dan jumlah keluarga penerima manfaat memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan indikator sosial ekonomi belum sepenuhnya merata dan masih menimbulkan kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan menyeluruh, seperti pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan program pengentasan kemiskinan, serta pengawasan terhadap implementasi program bantuan sosial. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menekan kesenjangan distribusi pendapatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel tambahan yang diduga memengaruhi kesenjangan distribusi pendapatan, seperti tingkat pendidikan, akses layanan kesehatan, sektor ekonomi, dan infrastruktur. Analisis lebih mendalam terhadap faktor-

faktor ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyebab kesenjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Z., & Aprianti, V. (2024). Analysis of The Influence of Spending in The Health Sector and Proverty on Life Expectancy and Health Development Challenges in The Island Region (Case Study of District/City In Riau Islands Province). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 763. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1733>.
- Aswin, N. D. S., & Utama, M. S. (2019). *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. 11(8).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. (2024). *Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta (Rupiah/Bulan) (Rupiah), 2024*. 2018-2024. <https://bantulkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NDYjMQ==/upah-minimum-kabupaten-upah-minimum-provinsi-di-di-yogyakarta--rupiah-bulan---2024.html>. Diakses pada 3 Februari 2025.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2024). *Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2018-2024*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyZlI=/persentase-penduduk-miskin.html> Diakses pada 3 Februari 2025.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2023). *Profil Kemiskinan DI Yogyakarta Maret 2023*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/1355/profil-kemiskinan-di-yogyakarta-maret-2023.html>. Diakses pada 25 Mei 2025.
- Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. (2025). *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta, 2018-2024*. <https://yogyakarta.bps.go.id/en/statistics-table/3/TWt0MVNGZFdiV2RaYTFoSl0yRnRSVTF0YUUhSc1VUMDkjMw==/jumlah-keluarga-penerima-manfaat--kpm--dan-anggaran-bantuan-sosial-pangan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta--2024.html?year=2024> Diakses pada 25 Mei 2025.
- Becker, Gary S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Doeringer, P. B., & Piore, M. J. (1971). *Internal Labor Markets and Manpower Analysis*. Lexington, MA: D.C. Heath and Company.
- Fachruurrozi, M., Maulidyah, D., & Hasmarini, I. (2023). *Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Daerah Istimewa Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.390>
- Faranisa, A. A., Pertiwi, A., Kawuryan, I. S. S., & Fevriera, S. (2025). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi DIY Tahun 2012-2023 dengan Pendekatan Model Mixed Effect. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 21(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31940/jbk.v21i1.1-11>
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Firdaus, A., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap

- Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Bali Pada Tahun 2015-2022. *PRIMANOMICS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(3).
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>
- Frahita, C., & Nurhayati, S. F. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2017-2023. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5307>
- Hanum, N., & Sarlia, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi Di Provinsi Aceh. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, 3(1).
<https://doi.org/10.1234/jse.v3i1.1291>
- Ismail, I. F., Walewengko, E. N., & Sumual, J. I. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03).
- Kunenengan, R. M. A., Engka, D. S. M., & Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3).
- Maghriza, M. R., & Hasmarini, M. I. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Upah Minimum Kerja, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Yogyakarta Tahun 2010-2023.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31850/economos.v7i3.3451>
- Marti'ah, S. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa 2009-2021. 4(6).
- Muin, R., & Rosdiana. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial*, 5(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1844>
- Nurkse, R. (1953). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahman, R., & Putri, D. Z. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index>
- Siregar, M. R. F. (2021). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Mencegah Stunting Pada Balita Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3).
- Sutiono, F., & Syafitri, W. (2018). Belanja Kementrian/Lembaga, Belanja APBD, Kontibusi Sektoral, dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v3i3.75>